

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada bagian tinjauan pustaka ini, disajikan beberapa penelitian signifikan sebelumnya. Makna dari penelitian-penelitian terdahulu diperlihatkan dengan tujuan untuk memahami perbedaan dan kesamaan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang sedang diteliti, atau inovasi yang diusung oleh penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap relevan akan dijabarkan di bawah ini.

Pertama, artikel penelitian yang dilakukan oleh Dita Dekasari (2016) dan Sean Laily., et, al (2014) memfokuskan pada peningkatan pengaruh petani di Desa Sambiroto dan Beteti dalam meningkatkan ketahanan pangan serta faktor pendukung dan penghambatnya dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dita Dekasari (2016) dan Sean Laily., et, al (2014) menunjukkan bahwa implementasi pemberdayaan petani di Desa Sambiroto dan Beteti lebih efektif dalam mencapai ketahanan pangan. Seiring dengan peningkatan produksi yang menggembirakan, pengetahuan dan keterampilan petani dalam sektor pertanian turut meningkat. Keberhasilan peningkatan ketahanan pangan di Desa Sambiroto dan Beteti dipengaruhi utamanya oleh pelaksanaan program yang didukung oleh Kementerian Pertanian dan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), termasuk pemberian pupuk dan benih secara cuma-cuma. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan mesin pertanian, serta kendala dalam hal modal dan ketidakpastian cuaca.

Dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Dita Dekasari (2016) dan Sean Laily., et, al (2014) terdapat beberapa perbedaan, pertama Dita Dekasari (2016) dan Sean Laily., et, al (2014) memfokuskan penelitian pada pemberdayaan petani padi oleh Dinas Pertanian dan TMMD

sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada Pemberdayaan Kelompok Petani Sorgum Dalam Meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga. Kedua variabel yang digunakan dalam Dita Dekasari (2016) dan Sean Laily., et, al (2014) adalah aras mikro, aras mezzo dan aras makro sedangkan penulis menggunakan variabel dimensi bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan .

Kedua, artikel penelitian yang dilakukan oleh Mayrowani & Ashari (2016) memfokuskan penelitian pada peningkatan produksi, pendapatan, dan ketahanan pangan melalui kegiatan agroforestry (wanatani) dengan pola tumpang-sari serta memberdayakan masyarakat sekitar hutan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mayrowani & Ashari (2016) menunjukkan bahwa Perkembangan penerapan agroforestri menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Agroforestri, yang biasanya mencakup LMDH, mampu menghasilkan 41,32 persen pendapatan rumah tangga dan 2,39 tenaga kerja per hektar. Agroforestri merupakan strategi efektif untuk mencapai pemerataan dan mengurangi kemiskinan di kalangan masyarakat desa hutan, yang dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan produksi pangan.

Dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Mayrowani & Ashari (2016) terdapat beberapa perbedaan, pertama Mayrowani & Ashari (2016) memfokuskan penelitian pada Peningkatan Integrasi Kegiatan Kehutanan melalui Tumpangsari (Agroforestry) untuk tanaman padi, jagung, kacang-kacangan, dan lain-lain; Pemanfaatan lahan bawah tegakan (PLBT) untuk tanaman umbi-umbian (ganyong, garut, iles-iles, ubi, talas, suweg, dan lain-lain), dan tanaman obat-obatan (kunyit, jahe, kapulaga, kunyit, kencur, Laos, dll); dan Pengayaan tanaman yaitu pemanfaatan lahan dengan jenis pohon serbaguna (MPTS) seperti petai, sukun, kemiri, sagu, enau, jambu mete, durian, alpukat, karan, rambutan dan mangga sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada Pemberdayaan Kelompok Petani Sorgum Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Rumah

Tangga. Kedua variabel yang digunakan oleh Mayrowani & Ashari (2016) agroforestry, produksi pangan, kesejahteraan, dan ketahanan pangan sedangkan penulis menggunakan variabel dimensi bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan.

Ketiga, artikel penelitian yang dilakukan oleh Duaja et al., (2018) memfokuskan penelitian pada Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan introduksi padi hitam di pekarangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Duaja et al., (2018) menunjukkan bahwa partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan tergolong tinggi, dengan 40 dari 50 orang hadir dalam setiap sesi penyuluhan. Proses pembuatan RINMAS juga mencapai tingkat partisipasi yang tinggi, namun, penyiapan benih dengan metode SRI dinilai rendah. Kegiatan pengolahan tanah memiliki tingkat partisipasi tinggi, sedangkan penanaman dan aplikasi pupuk dinilai sedang. Selain itu, hasil pekarangan mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Sebagai rekomendasi, disarankan untuk menerapkan budidaya padi hitam berbasis Teknologi RINMAS dalam kegiatan pertanian pekarangan.

Dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh (Duaja et al., 2018) terdapat beberapa perbedaan, pertama (Duaja et al., 2018) memfokuskan penelitian pada cara penanaman padi hitam SRI dalam pot dan pengolahan limbah pertanian menjadi pupuk organik cair (POC) dan pupuk padat (kompos) dengan memanfaatkan biodekomposer MOL RINMAS yang dapat ditemukan di sekitar area rumah dan lahan pertanian. Kedua variabel yang digunakan oleh (Duaja et al., 2018) Penyuluhan materi, demonstrasi, persemaian, pengelolaan tanah dan pemberian pupuk dasar serta penggunaan teknologi SRI dan MOL RINMAS sedangkan penulis menggunakan variabel dimensi bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Pemberdayaan

2.2.1.1 Pengertian Pemberdayaan

Empowerment, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut "pemberdayaan", adalah suatu konsep yang berkembang sebagai bagian dari evolusi spiritual dan budaya Barat, terutama di Eropa. Konsep ini pertama kali muncul pada sekitar tahun 70-an dan terus berkembang hingga tahun 80-an hingga saat ini. Pemberdayaan fokus pada aspek kekuasaan (*power*). Konsep ini berasumsi bahwa penerimaan terhadap kekuasaan sebagai faktor utama, dan tujuannya adalah memberdayakan yang tidak memiliki kekuasaan agar dapat memiliki kekuasaan. Dengan kata lain, *empowerment* berusaha memberikan kekuasaan kepada yang sebelumnya tidak berdaya sehingga menjadi memiliki kekuasaan (*powerfull*). (Lasiman Sugiri, 2019, p. 57).

Menurut Sumardjo dalam Kiki Endah (2020, p. 137) pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana peluang, motivasi, dan akses terhadap sumber daya masyarakat dikembangkan, dengan tujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menentukan masa depan mereka sendiri. Ini melibatkan partisipasi aktif dalam mempengaruhi dan menciptakan kualitas hidup baik pada tingkat individu maupun komunitas.

Menurut Ife dalam Dwi Iriani Margayaningsih (2018, p. 78) Pemberdayaan adalah memberikan kepada masyarakat sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan sebagai persiapan untuk meningkatkan kemampuan diri mereka dalam menentukan masa depan. Ini juga mencakup keterlibatan aktif serta pengaruh dalam kehidupan komunitas mereka sendiri.

Pemberdayaan menurut Adams dalam Ulfi Putra Sany(2019, p. 34) Artinya, cara dan metode yang diterapkan oleh individu, kelompok, atau komunitas bertujuan agar mereka dapat mengelola lingkungan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, mereka dapat berkolaborasi dan saling mendukung untuk memaksimalkan kualitas hidup.

Dari berbagai pengertian pemberdayaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pemberian kekuasaan yang melibatkan peluang atau kemungkinan seperti pengetahuan, keterampilan, dan materi. Hal ini bertujuan untuk mengubah pihak yang sebelumnya tidak memiliki daya (powerless) menjadi memiliki daya atau memberikan dukungan dalam meningkatkan keterampilan, kemampuan, kapasitas, dan rasa percaya diri. Dengan demikian, mereka dapat memiliki kekuatan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, mencapai kehidupan yang lebih baik, dan memiliki kontrol terhadap masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

2.2.1.2 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan menurut Sulistiyani dalam Nekky Rahmiyati, et, al (2015, p. 53) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat agar menjadi mandiri. Kemandirian mencakup aspek berpikir, bertindak, dan mengendalikan tindakan yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi di mana masyarakat memiliki kemampuan untuk memikirkan, membuat keputusan, dan melaksanakan tindakan untuk mencapai solusi yang tepat terhadap masalah yang dihadapi, dengan memanfaatkan daya dan kemampuan yang dimilikinya.

Tujuan dari pemberdayaan adalah membentuk individu dan masyarakat agar dapat mencapai kemandirian. Kemandirian ini mencakup kemampuan berpikir, bertindak, dan mengendalikan tindakan. Penting untuk dipahami dengan jelas apa yang dimaksud sebagai masyarakat mandiri. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi di mana mereka memiliki kemampuan untuk berpikir, membuat keputusan, dan melaksanakan tindakan yang dianggap tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, dengan memanfaatkan daya dan kemampuan yang melibatkan

aspek kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam lingkungan internal masyarakat tersebut.

Untuk mencapai kemandirian, diperlukan dukungan berupa sumber daya manusia yang utuh, mencakup kondisi kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif, serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material. (Suryana, 2019, p. 5)

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat agar dapat mencapai kemandirian. Kemandirian ini mencakup kemampuan berpikir, bertindak, dan mengendalikan tindakan mereka. Kemandirian masyarakat merupakan kondisi yang dialami oleh masyarakat dan melibatkan aspek kelembagaan pertanian, perbaikan kehidupan masyarakat, serta perbaikan usaha dan lingkungan hidup.

2.2.1.3 Tahapan-Tahapan Pemberdayaan

Proses pembelajaran dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan dilakukan secara bertahap. Menurut Sulistyani dalam Zhumronie (2018, pp. 33–34), tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan langkah awal menuju perilaku yang sadar dan peduli, di mana masyarakat mulai menyadari kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas diri mereka. Tahap ini mencakup proses persiapan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Para pemberdaya atau pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan kondisi awal yang mendukung agar proses pemberdayaan berjalan secara efektif. Intervensi dalam masyarakat pada tahap ini lebih menitikberatkan pada kemampuan afektif untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Upaya penyadaran ini bertujuan membuka keinginan dan kesadaran

- masyarakat terhadap kondisinya saat itu, mendorong mereka untuk menyadari pentingnya memperbaiki situasi guna menciptakan masa depan yang lebih baik.
- b. Tahap transformasi kemampuan melibatkan pengembangan wawasan pengetahuan dan penguasaan ketrampilan dasar agar masyarakat memiliki kemampuan yang lebih luas dan dapat berperan aktif dalam pembangunan. Pada tahap ini, masyarakat masih terbatas dalam memberikan partisipasi, terutama sebagai pengikut atau objek pembangunan, dan belum sepenuhnya mampu menjadi subjek yang aktif dalam proses pembangunan.
 - c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan ketrampilan merupakan langkah krusial dalam membentuk inisiatif dan kemampuan inovatif, yang pada akhirnya akan mengantarkan masyarakat menuju kemandirian. Proses pengayaan intelektual dan peningkatan ketrampilan ini penting untuk membekali masyarakat dengan kemampuan yang diperlukan agar mereka dapat mencapai kemandirian. Kemandirian ini tercermin dalam kemampuan masyarakat untuk menghasilkan inisiatif, menciptakan kreasi, dan melakukan inovasi di lingkungan sekitarnya. Ketika masyarakat berhasil mencapai tahap ini, mereka akan dapat menjalankan proses pembangunan secara mandiri.

Pemberdayaan adalah sebuah proses pembelajaran yang berlangsung secara bertahap hingga mencapai status kemandirian. Tahap-tahap proses belajar ini memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pemberdayaan. Tahap-tahap yang harus dilalui menurut Lucie dalam Ayunda (2014, p. 17) meliputi:

1. Tahap awal melibatkan penyadaran dan pembentukan perilaku sadar dan peduli agar masyarakat merasa perlunya peningkatan kapasitas diri.

2. Tahap selanjutnya adalah proses transformasi kemampuan kerja, melibatkan peningkatan wawasan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan dasar, sehingga masyarakat dapat mengambil peran aktif dalam pembangunan.
3. Tahap berikutnya adalah peningkatan kemampuan intelektual, keterampilan, dan kecakapan, yang membawa pada pembentukan inisiatif dan kemampuan inovatif, menuju tercapainya kemandirian.

2.2.1.4 Dimensi Pemberdayaan

Menurut Mardikanto dan Soebiato, pemberdayaan adalah suatu proses di mana masyarakat memperoleh dan mengoptimalkan daya yang dimilikinya atau dapat dimanfaatkan. Daya tersebut mencakup kemampuan, keberanian, kekuasaan, atau posisi tawar. Dalam konsep pemberdayaan mereka, Mardikanto dan Soebiato mengidentifikasi empat bidang pembinaan yang relevan. (Windy Saputra, 2007, pp. 5–9; Julika & Irawati, 2016, p. 6), yaitu :

1. Bina Manusia.

Penting untuk menyoroti Bina Manusia sebagai langkah pertama dan kunci dalam setiap inisiatif pemberdayaan masyarakat. Aspek ini mencakup evaluasi kemampuan individu maupun kelompok manusia. Keterampilan menjadi faktor penentu dalam memastikan kelangsungan hidup dengan memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai stabilitas finansial atau ekonomi.

2. Bina Usaha.

Bina usaha menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi, menjadikannya aspek krusial yang mendukung kemajuan kemanusiaan. Lebih dari sekadar meningkatkan kapasitas pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu atau kelompok petani, perlu dilakukan peningkatan kualitas yang bersifat holistik. Ini melibatkan upaya maksimal dalam memanfaatkan potensi masyarakat dan sumber daya daerah. Dalam kerangka

teori yang diterapkan dalam penelitian ini, dimensi bina usaha dibagi menjadi beberapa prioritas, seperti pemilihan komoditas tanaman pangan, pembentukan kelompok tani, pengembangan sarana dan prasarana pendukung, serta pembangunan jejaring pemasaran.

3. Bina Lingkungan

Bina Lingkungan bukan hanya membahas aspek fisik tetapi juga menyadari bahwa lingkungan sosial memiliki dampak signifikan. Kondisi baik dalam aspek fisik dan non-fisik menjadi hal krusial yang harus mendapat perhatian serius ketika lingkungan mengalami kerusakan. Kerusakan ini dapat berdampak negatif pada kehidupan manusia. Mengembalikan keadaan baik pada lingkungan fisik dan lingkungan sosial menjadi keunggulan suatu wilayah yang mampu memelihara kondisi lingkungan yang layak. Hal ini tidak hanya memberikan makna, nilai, dan manfaat lebih bagi masyarakat tetapi juga merupakan faktor penentu terhadap perubahan di lingkungan.

4. Bina Kelembagaan

Kelembagaan sosial atau organisasi sosial yang efektif menjadi fondasi penting dalam mendukung implementasi bina manusia, usaha, dan lingkungan. Dalam dimensi bina kelembagaan, terdapat dua fokus utama, yakni pembentukan lembaga terkait seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfungsi sebagai fasilitator dan katalisator, serta peran aktif lembaga yang terkait dengan pengusaha dan petani.

2.2.2 Ketahanan Pangan

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, Ketahanan Pangan merupakan keadaan di mana kebutuhan pangan bagi negara hingga tingkat perseorangan terpenuhi. Hal ini tercermin dari ketersediaan pangan yang mencakup jumlah dan kualitas yang memadai, keamanan, keragaman, gizi, distribusi yang merata, serta harga yang terjangkau. Selain itu, kondisi ini juga diharapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai

agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup secara sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. (Rumawas et al., 2021, p. 2).

Ketahanan pangan, sebagaimana dijelaskan oleh FIVIMS, merujuk pada situasi di mana setiap individu, setiap saat, dalam segi fisik, sosial, dan ekonomi, dapat memperoleh pangan yang mencukupi, aman, dan bergizi sesuai dengan kebutuhan konsumsinya dan selaras dengan preferensinya. Tujuannya adalah untuk mendukung gaya hidup yang aktif dan sehat. (Suharyanto, 2011, p. 185).

Dengan merujuk pada definisi ketahanan pangan yang disajikan menurut Rachman dalam (Indah Ramadani, 2020, p. 22), aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

- a) Tujuan akhir yang harus dicapai dalam ketahanan pangan adalah rumah tangga.
- b) Keberlanjutan dan cukupnya persyaratan untuk mencapai ketahanan pangan perlu diwujudkan.
- c) Ketahanan pangan di seluruh tingkatan, baik global, nasional, regional, lokal, maupun di tingkat rumah tangga, membentuk sebuah hirarki.
- d) Ketahanan pangan dianggap sebagai sistem ekonomi pangan yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi, dimana ketiganya saling terkait erat.
- e) Perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat domestik maupun internasional, berpengaruh pada pengembangan ketahanan pangan.
- f) Karakteristik inherent yang ada dalam setiap subsistem ketahanan pangan di tingkat nasional, regional, maupun lokal.

Tiga pilar ketahanan pangan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan melibatkan (Indah Ramadani, 2020, p. 23):

- a) Ketersediaan (Availability) merujuk pada jumlah pangan yang ada dalam jumlah yang cukup, aman, dan bergizi untuk seluruh penduduk dalam suatu negara. Sumber pangan dapat berasal dari produksi lokal, impor, cadangan pangan, dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan harus dapat memenuhi kebutuhan nutrisi yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang aktif dan sehat.
- b) Keterjangkauan (Accessibility) mengacu pada kemampuan rumah tangga dan individu, dengan sumber daya yang dimilikinya, untuk memperoleh pangan yang cukup sesuai dengan kebutuhan gizinya. Akses tersebut dapat dicapai melalui produksi pangan sendiri, pembelian, atau melalui bantuan pangan. Faktor-faktor yang memengaruhi akses termasuk aspek ekonomi, fisik, dan sosial.
- c) Stabilitas (Stability) merupakan dimensi waktu dari ketahanan pangan yang terbagi menjadi kerawanan pangan kronis dan kerawanan pangan sementara. Kerawanan pangan kronis terjadi ketika masyarakat tidak dapat memperoleh kebutuhan pangan setiap saat, sedangkan kerawanan pangan sementara disebabkan oleh peristiwa sementara seperti kekeringan, banjir, bencana, atau konflik sosial.

Lembaga internasional seperti FAO dan IFPRI menggunakan indikator ini sebagai alat untuk menilai tingkat kelaparan dan pencapaian Poin 2 SDGs, yaitu mengatasi kelaparan dan menciptakan ketahanan pangan. Pilar utama yang menjadi penentu dalam konteks ketahanan pangan adalah (Hadi et al., 2019, p. 175) :

- a) Ketersediaan Pangan: Mengacu pada ketersediaan fisik pangan di suatu daerah, yang dapat berasal dari produksi lokal, impor, perdagangan, atau bantuan pangan. Ketersediaan

pangan diukur melalui parameter-produksi lokal, jumlah impor, stok yang dipegang oleh pedagang dan pemerintah, serta bantuan pangan yang diterima.

- b) Akses Pangan: Mencakup kemampuan rumah tangga untuk memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup. Akses ini dapat berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman, atau bantuan pangan.
- c) Ketersediaan Pangan: Meskipun ketersediaan pangan di suatu daerah cukup, tidak semua rumah tangga mungkin memiliki akses yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun keragaman pangan.
- d) Pemanfaatan Pangan: Merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan metabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga melibatkan aspek penyimpanan, pengolahan, dan persiapan makanan, termasuk penggunaan air dan bahan bakar selama proses pengolahan, serta memperhatikan kondisi kebersihan dan budaya sekitar.

Ada beberapa hal penting dalam mengatasi permasalahan pangan di Indonesia.

Purwaningsih dalam Rumawas et al., (2021, p. 6) yaitu:

- a) Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan pangan yang memadai bagi semua warga negara, tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga mutu. Setiap warga negara berhak mendapatkan akses terhadap pangan guna memastikan kelangsungan hidupnya. Upaya peningkatan produksi pangan dalam negeri harus dikejar setiap tahun untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk.
- b) Kemandirian pangan menjadi indikator krusial dalam memenuhi kebutuhan rakyat suatu negara. Negara yang benar-benar berdaulat tidak bergantung pada negara lain, baik dalam hal politik, keamanan, maupun ekonomi.

- c) Keterjangkauan pangan atau kemampuan masyarakat (rumah tangga) untuk mengakses bahan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli. Daya beli ini sendiri ditentukan oleh tingkat pendapatan dan harga komoditas pangan.
- d) Konsumsi pangan berkaitan erat dengan aspek gizi yang mencukupi dan seimbang. Pola konsumsi pangan dan gizi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan budaya di tingkat lokal.